

## **ABSTRAK**

Indonesia telah menjalankan kesepakatan WTO lewat implementasi kebijakan pertanian dalam negeri. Implementasi kebijakan tersebut tertuang dalam deregulasi (penyesuaian kebijakan) yang diterbitkan dalam bentuk undang-undang dan juga keputusan pemerintah (presiden atau menteri). Kesepakatan WTO kemudian menjadi acuan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Penyesuaian dan implementasi kesepakatan WTO bidang pertanian tersebut meliputi pengurangan subsidi domestik, pengurangan subsidi ekspor, dan kemudahan akses pasar.

Kata kunci : WTO (*World Trade Organization*), Kebijakan Pertanian Indonesia, Kemudahan akses pasar, Liberalisasi, Rezim internasional.

Perundingan WTO bidang pertanian selalu menarik perhatian dunia karena isu-isu yang dibahas tergolong cukup sensitif di mana negara maju dan negara berkembang masing-masing mempunyai kepentingan berbeda. Perundingan *Uruguay Round* merupakan perundingan multilateral untuk menata kembali aturan main di bidang perdagangan internasional dan telah berlangsung sejak September 1986 dan berakhir April 1994. Perundingan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat sistim GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan mencegah semakin meningkatnya kecenderungan proteksionisme (menutup diri) di berbagai negara terutama di negara maju.

Diterbitkannya Undang-Undang No.7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) pendirian WTO "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" bermakna Indonesia resmi menjadi anggota WTO. Hal ini berarti Indonesia berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan semua persetujuan yang ada di WTO. Indonesia terikat dengan aturan-aturan WTO yang akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan.

Karena semua kebijakan pertanian yang akan diterapkan Indonesia adalah bentuk implementasi dari kesepakatan yang telah di buat di WTO. Hal itu mendapat dukungan penuh dari era keterbukaan dan globalisasi. Globalisasi perdagangan sektor pertanian membawa sistem pertanian Indonesia masuk dalam mekanisme pasar bebas dan dalam persaingan terbuka. Sehingga implementasi kebijakan atau kesepakatan WTO di Indonesia menjadi sangat penting.

Bagaimana Implementasi kebijakan World Trade Organization dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Indonesia?

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan liberalisme dan rezim internasional Kedua pendekatan tersebut, harapannya dapat menjadi kerangka analisa dalam menjelaskan skema kerja WTO dan implementasi kesepakatan WTO di Indonesia.

Pada 2 November 1994 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Penerbitan Undang-Undang tersebut sebagai bentuk adopsi (implementasi) perjanjian

internasional, sesuai dengan pembentukan WTO pada April 1994.

Salah satu hal penting yang diatur dalam WTO adalah sektor pertanian yang memuat tentang Perjanjian Pertanian. Persetujuan Bidang Pertanian (*Agreement on Agriculture, AoA*) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995. Persetujuan Bidang Pertanian bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Bidang pertanian mengatur tentang kemudahan akses pasar, pengaturan subsidi domestik dan subsidi ekspor.

Kebijakan-kebijakan WTO itulah yang harus ditaati oleh setiap anggota, termasuk Indonesia. Oleh sebab itulah Indonesia perlu menyusun agenda penyesuaian (implementasi kebijakan) agar sejalan dengan agenda WTO. Manfaat dari keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang. Untuk itu

konsekuensi yang antara lain perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan. Sebagai bentuk dari implementasi kesepakatan di WTO di Indonesia khususnya sektor pertanian.

Sektor pertanian adalah sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Kemudahan akses pasar dan penurunan tarif bea masuk bagi sektor pertanian telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan Internasional dan juga deregulasi yang telah diterbitkan pemerintah. Indonesia telah menjalankan kesepakatan WTO lewat implementasi kebijakan pertanian dalam negeri. Implementasi kebijakan tersebut meliputi penurunan bea masuk barang impor, pengurangan dan pengalihan subsidi pertanian, mengurangi hambatan non-tarif, dan kemudahan akses pasar.

Subsidi sektor pertanian di Indonesia secara garis besar terdiri dari Subsidi Domestik dan Subsidi Ekspor. Subsidi tersebut merupakan suatu dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing komoditas pertanian nasional. Selain itu, ada pula capaian strategis dari pemberlakuan subsidi domestik

dan subsidi ekspor, yaitu untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional.

Perjanjian Pertanian tidak melarang semua bentuk subsidi kepada produsen tetapi menentukan disiplin yang lebih teratur dalam subsidi domestik. Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) bentuk subsidi, yakni subsidi yang diperbolehkan dan subsidi yang terkena komitmen pengurangan. Kategori subsidi yang diperbolehkan ini dikenal sebagai kategori *green box*. Kriteria untuk mengkategorikan subsidi tersebut masuk dalam kategori *green box* adalah bahwa kebijaksanaan subsidi tersebut mempunyai dampak distorsi minimal terhadap perdagangan dan secara sosial dan politis diperlukan.

Jenis-jenis atau bentuk subsidi yang termasuk dalam kelompok program pemerintah (*government service programmes*) adalah layanan umum, subsidi untuk keamanan pangan, bantuan pangan dalam negeri, pembayaran langsung kepada produsen, subsidi keuangan pemerintah dalam asuransi pendapatan dan program keselamatan, pembayaran untuk bantuan bencana alam, bantuan penyesuaian struktural yang diberikan melalui program pensiun, bantuan penyesuaian struktural yang diberikan melalui bantuan investasi, pembayaran melalui program

lingkungan, pembayaran di bawah program bantuan regional.

Disamping itu terdapat jenis subsidi yang menimbulkan dampak sehingga perlu dilakukan pembatasan. Kategori subsidi yang dibatasi ini dikenal sebagai *amber box* ini antara lain kebijaksanaan subsidi di luar *green box*. Subsidi dalam katagori *amber box* ini dikenakan pengurangan tingkat subsidi, termasuk di dalamnya antara lain adalah *market price support* (perbedaan harga domestik dengan harga internasional), *direct payment to producers, input and marketing cost reduction*. Menurut ketentuan dalam perjanjian pertanian kewajiban negara-negara maju adalah menurunkan tingkat subsidi dalam *amber box* sebesar 20% dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6 tahun dengan tahun dasar 1986-1988. Apabila subsidi dalam kategori *amber box* ini hanya mencapai 5% dari nilai produksi, maka tidak terkena ketentuan penurunan subsidi (*de minimise*). Bagi negara-negara berkembang diberikan keringanan kewajiban menurunkan subsidi domestik sebesar  $\frac{2}{3}$  dari kewajiban negara-negara maju, yakni 13,33%. Sedangkan batas minimal subsidi yang tidak

perlu dilakukan penurunan subsidi adalah sebesar 10% dari nilai produksi pertanian.

Kebijakan-kebijakan WTO itulah yang harus ditaati oleh setiap anggota khususnya Indonesia. Oleh sebab itulah Indonesia perlu menyusun agenda penyesuaian (implementasi kebijakan) terutama penyesuaian struktural agar sejalan dengan agenda WTO. Manfaat keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas. Tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Khususnya dalam menghadapi mitra dagang, maka dari itu konsekuensi yang perlu ditindak lanjuti adalah kebutuhan untuk menyempurnakan atau mempersiapkan peraturan perundangan yang diperlukan.

Diterbitkannya Undang-Undang No.7 tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) pendirian WTO "*Agreement Establishing the World Trade Organization*" bermakna Indonesia resmi menjadi anggota WTO. Hal ini berarti Indonesia berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan semua persetujuan yang ada di WTO. Indonesia terikat dengan aturan-aturan WTO yang



akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan.

Karena semua kebijakan pertanian yang akan diterapkan Indonesia adalah bentuk implementasi dari kesepakatan yang telah di buat di WTO. Hal itu mendapat dukungan penuh dari era keterbukaan dan globalisasi. Globalisasi perdagangan sektor pertanian membawa sistem pertanian Indonesia masuk dalam mekanisme pasar bebas dan dalam persaingan terbuka. Sehingga implementasi kebijakan atau kesepakatan WTO di Indonesia menjadi sangat penting.

Indonesia terikat dengan aturan-aturan WTO yang akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan. Karena semua kebijakan pertanian yang akan diterapkan Indonesia adalah bentuk implementasi dari kesepakatan yang telah di buat di WTO. Hal itu mendapat dukungan penuh dari era keterbukaan dan globalisasi. Globalisasi perdagangan sektor pertanian membawa sistem pertanian Indonesia masuk dalam mekanisme pasar bebas dan dalam persaingan terbuka.

Namun keterbukaan tersebut telah berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di

Indonesia. Sektor pertanian semakin membuka akses pasarnya agar produk dari negara lain, dan investasi asing dapat tumbuh di Indonesia. Kebijakan kemudahan akses pasar juga sejalan dengan kebijakan subsidi domestik dan subsidi ekspor, yang berfungsi untuk memperkuat daya saing dan kualitas komoditas produk sektor pertanian di Indonesia dalam perdagangan internasional.

Kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor.